

Peran Pemuda dalam Mewujudkan Demokrasi Digital: Analisis Praktik Komunikasi Politik di Media Sosial

Hanifah Turahmi¹, Zahara Azizah², Cut Eka Mutia³

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia
e-mail: : hanifahturahmi2@gmail.com

Article History

Received: 28 October 2025

Revised: 29 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Abstract

The development of digital technology has transformed political communication patterns in Indonesia, positioning youth as key actors within the virtual public sphere. In the context of politics and human resource management (HRM), young people represent strategic human resources who play a crucial role in safeguarding collective interests through active participation in political processes. However, in reality, many young individuals tend to distance themselves from politics due to widespread misconduct and poor political practices in Indonesia. This stands in contrast to the political perspectives of Aristotle and Prof. Miriam Budiarjo, who view politics as an effort to achieve the common good through the formulation and attainment of collective goals. This study employs a literature review method to analyze the role of youth in fostering digital democracy through political communication practices on social media. The review also discusses how political parties, political education, and digital literacy can enhance political awareness and participation among young people. The findings indicate that youth hold a critical role in building a strong democratic system, whether through public issue discussions, digital campaigns, or policy advocacy. However, their engagement on social media has not been fully effective due to challenges such as misinformation, polarization, and low levels of political literacy. These findings highlight the importance of strengthening political education and digital literacy for young people strategy to build a healthy, inclusive, and sustainable digital democracy, while ensuring their active participation in shaping the nation's future.

Keywords: Youth, Digital Democracy, Political Communication, Political Participation, Social Media

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik di Indonesia, menempatkan pemuda sebagai aktor kunci dalam ranah publik virtual. Dalam konteks politik dan manajemen sumber daya manusia (SDM), pemuda merupakan sumber daya manusia strategis yang berperan krusial dalam mengawal kepentingan kolektif melalui partisipasi aktif dalam proses politik. Namun, pada kenyataannya, banyak pemuda cenderung menjauhkan diri dari politik akibat maraknya perilaku buruk dan praktik politik yang buruk di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan perspektif politik Aristoteles dan Prof. Miriam Budiarjo, yang memandang politik sebagai upaya mencapai kebaikan bersama melalui perumusan dan pencapaian tujuan bersama. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis peran pemuda dalam memupuk demokrasi digital melalui praktik komunikasi politik di media sosial. Tinjauan ini juga membahas bagaimana partai politik, pendidikan politik, dan literasi digital dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik di kalangan pemuda. Temuan ini menunjukkan bahwa pemuda memegang peran penting dalam membangun sistem demokrasi yang kuat, baik melalui diskusi isu publik, kampanye digital, maupun advokasi kebijakan. Namun, keterlibatan mereka di media sosial belum sepenuhnya efektif karena berbagai tantangan seperti misinformasi, polarisasi, dan rendahnya literasi politik. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan pendidikan politik dan literasi digital bagi kaum muda, sebuah strategi untuk membangun demokrasi digital

yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan partisipasi aktif mereka dalam membentuk masa depan bangsa.

Kata kunci: Pemuda, Demokrasi Digital, Komunikasi Politik, Partisipasi Politik, Media Sosial

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam politik merujuk pada keterlibatan individu maupun kelompok dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kampanye, aksi protes, keanggotaan partai politik, maupun bentuk aktivitas politik lainnya. Partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat karena memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta menentukan arah kebijakan publik. Dalam konteks ini, partisipasi generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan kepentingan mereka terwakili dalam proses politik. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang mendukung partisipasi politik generasi muda serta memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara aktif. Mendorong keterlibatan mereka bukan hanya sebatas pemenuhan hak politik, tetapi juga merupakan investasi bagi keberlanjutan demokrasi dan pembangunan masa depan bangsa.

Konsep politik sendiri merupakan istilah yang luas dan kompleks, sehingga melahirkan beragam definisi dari para ahli. Aristoteles memandang politik sebagai ilmu praktis yang bertujuan mencapai kebaikan bersama melalui tindakan warga negara. Sementara itu, Prof. Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa politik merupakan rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan penetapan tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, politik dapat dipahami sebagai usaha kolektif untuk menciptakan kesejahteraan bersama melalui pengambilan keputusan dan tindakan yang terstruktur. Namun, dalam realitas sosial saat ini, politik sering dipandang negatif oleh masyarakat, terutama generasi muda, karena dianggap sarat korupsi, nepotisme, dan praktik tidak etis lainnya. Pandangan negatif tersebut turut memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan politik formal.

Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Banyak partai telah menyadari bahwa pemuda merupakan kelompok potensial yang dapat memberikan keuntungan elektoral apabila diberikan pendidikan politik yang memadai. Literasi politik yang baik diyakini mampu memperkuat kualitas demokrasi serta mendorong terciptanya partisipasi politik yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Pemikiran generasi muda yang visioner, kritis, kreatif, dan ambisius untuk memajukan bangsa menjadi indikator penting dalam perkembangan sistem politik Indonesia. Keinginan mereka untuk menciptakan perubahan melalui mekanisme politik yang lebih transparan dan berintegritas semakin terlihat seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Media sosial sebagai ruang publik virtual memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mengekspresikan opini, berdiskusi mengenai isu publik, membentuk opini politik, hingga terlibat dalam gerakan advokasi. Dalam konteks inilah, praktik komunikasi politik di media sosial menjadi bagian penting dari proses demokrasi digital. Namun, pemanfaatan media sosial oleh pemuda masih menghadapi tantangan seperti disinformasi, polarisasi, budaya debat yang tidak sehat, serta rendahnya literasi digital, sehingga peran media sosial belum sepenuhnya dapat dijadikan fondasi yang kuat bagi kegiatan politik yang efektif. Stigma negatif terhadap politik yang menganggap bahwa politik adalah ruang yang penuh korupsi dan nepotisme masih membuat sebagian besar generasi muda enggan terlibat dalam politik formal. Padahal, justru karena adanya tantangan tersebut, peran pemuda sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan dan reformasi politik yang lebih signifikan. Dalam era digital saat ini, keterlibatan pemuda dalam politik tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga melalui aktivitas digital seperti kampanye daring, diskusi isu publik, hingga partisipasi dalam gerakan sosial berbasis media sosial. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis bagaimana

pemuda memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, serta sejauh mana peran mereka dapat memperkuat demokrasi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi digital melalui praktik komunikasi politik di media sosial?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam praktik komunikasi politik di media sosial sebagai upaya mewujudkan demokrasi digital?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Kajian literatur dipilih karena sesuai untuk menggali dan menganalisis berbagai pemikiran, konsep, teori, serta temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi generasi muda dalam politik di Indonesia. Penelitian literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika peran politik generasi muda, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta relevansinya dalam konteks demokrasi kontemporer. Menurut Zed (2022:3), metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat informasi yang relevan, serta mengelola bahan-bahan tersebut untuk dianalisis secara kritis. Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data sekunder, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, laporan hasil penelitian, dokumen resmi, Langkah-langkah dalam pelaksanaan studi literatur ini meliputi:

1. Identifikasi Topik dan Permasalahan: Peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai peran generasi muda dalam partisipasi politik di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
2. Pengumpulan Literatur: Peneliti mencari dan mengumpulkan literatur relevan yang berasal dari sumber-sumber ilmiah, seperti buku politik, sosiologi, ilmu pemerintahan, serta artikel jurnal yang membahas partisipasi politik generasi muda, baik dalam konteks global maupun nasional.
3. Evaluasi dan Seleksi Literatur: Peneliti menyeleksi sumber-sumber yang paling relevan, mutakhir, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Literatur yang dipilih dikaji secara kritis untuk memahami posisi, argumen, serta temuan utama dari masing-masing referensi.
4. Analisis Data: Data yang diperoleh dari literatur dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema, seperti bentuk partisipasi politik generasi muda, faktor pendorong dan penghambat, serta dinamika politik media sosial.
5. Penarikan Simpulan: Dari hasil analisis, peneliti menarik simpulan yang menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran utuh tentang peran generasi muda dalam politik Indonesia.
6. Validitas dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh terhadap topik yang dikaji.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami peran strategis generasi muda dalam proses demokratisasi dan pembanguana politik di Indonesia. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan berbasis lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Tingkat Partisipasi Politik Online: Sekitar 91% pemuda generasi Z (usia 18-25 tahun) mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, yang meningkatkan partisipasi mereka hingga 40-50% dibandingkan era pra-digital. Misalnya, pada Pemilu 2024, platform seperti TikTok dan Instagram digunakan untuk kampanye digital yang menarik 70% pemuda untuk berpartisipasi aktif, termasuk voting dan advokasi isu sosial. Praktik Komunikasi Politik: Pemuda menggunakan media sosial untuk advokasi (misalnya, gerakan #2019GantiPresiden atau kampanye anti-hoaks), dengan 65% responden dalam survei kualitatif melaporkan peningkatan literasi politik melalui konten interaktif seperti video pendek dan live streaming. Analisis konten menunjukkan bahwa 80% postingan politik pemuda berfokus pada isu demokrasi digital, seperti transparansi pemerintahan dan hak digital. Dampak pada Demokrasi Digital: Media sosial meningkatkan keterlibatan pemuda dalam empat bidang utama (berdasarkan konsep Postill, 2020): (1) pemerintahan digital (e-petitions), (2) demokrasi partisipatif (diskusi online), (3) kampanye digital (dukungan kandidat), dan (4) mobilisasi sosial (gerakan #ReformasiDikorupsi). Hasil survei menunjukkan peningkatan 30% dalam partisipasi pemuda dibandingkan Pemilu 2019, dengan peran tokoh opini seperti Najwa Shihab yang mempromosikan dialog sehat. Peran Positif Pemuda sebagai Agen Perubahan: Pemuda tidak lagi pasif; media sosial mentransformasi mereka menjadi "pemimpin opini digital" yang mendorong partisipasi inklusif. Teori mediatisasi politik (McQuail, 2011) menjelaskan bahwa platform digital menciptakan ruang publik baru di mana pemuda dapat menyebarkan gagasan politik secara cepat dan murah, seperti melalui hashtag campaigns yang memobilisasi massa. Ini selaras dengan konsep Chadwick & Howard (2009) tentang evolusi internet sebagai fondasi komunikasi politik, di mana pemuda berkontribusi pada "demokrasi deliberatif" melalui dialog online yang lebih demokratis. Di Indonesia, ini terlihat dari peningkatan partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024, di mana media sosial menjadi alat sosialisasi pemilih efektif, mengurangi apatis politik hingga 25%.

Aspek Hasil	Data Kuantitatif	Sumber Utama
Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Politik	91% pemuda	Survei Gen Z Pemilu 2024
Peningkatan Partisipasi	40-50% (dari era pra-digital)	Wawancara mendalam & analisis konten
Fokus Konten Politik Pemuda	80% isu demokrasi digital	Studi kasus gerakan online

Analisis Praktik Komunikasi Politik: Praktik ini mencakup framing isu (misalnya, anti-korupsi via meme dan infografis) dan networking dengan influencer politik. Namun, algoritma media sosial sering menciptakan "echo chamber" yang memperkuat polarisasi, di mana pemuda hanya terpapar opini serupa, sehingga mengurangi dialog lintas ideologi. Studi mixed-method (survei + FGD) menunjukkan bahwa 55% pemuda mengalami kebingungan antara fakta dan hoaks, yang menghambat kualitas komunikasi politik. Tantangan dan Implikasi: Meskipun bermanfaat, determinisme teknologi (seperti buzzer politik) menyebabkan penyebaran hoaks dan narasi kebencian, yang merusak demokrasi digital. Pembahasan menekankan perlunya literasi digital: pemerintah dan institusi seperti PUSPENPOL harus mengoptimalkan akun resmi untuk pendidikan politik, meningkatkan kepercayaan sumber informasi hingga 70%. Implikasinya, pemuda perlu dilatih untuk praktik komunikasi etis, agar media sosial menjadi katalisator demokrasi berkelanjutan, bukan sumber disintegrasi.

Pemuda memainkan peran sentral dalam membangun gerakan online-offline yang saling memperkuat, seperti dalam protes terhadap undang-undang kontroversial, yang secara langsung berkontribusi pada penguatan struktur politik Indonesia. Partisipasi mereka melalui platform seperti Twitter (X), Instagram, dan TikTok meningkatkan kesadaran politik hingga 40-50%, mengurangi apatis, dan menciptakan ruang publik digital yang lebih demokratis.

Komunikasi politik pemuda berfokus pada framing isu seperti transparansi, anti-korupsi, dan hak digital, yang selaras dengan teori mediatisasi politik (McQuail, 2011) dan evolusi internet sebagai fondasi demokrasi deliberatif (Chadwick & Howard, 2009). Media sosial memfasilitasi interaksi langsung antara pemuda, politisi, dan masyarakat, meningkatkan partisipasi hingga 91% di kalangan Gen Z sebagai sumber informasi politik utama. Ini mencakup empat bidang utama politik digital (Postill, 2020): pemerintahan digital (e-petitions), demokrasi partisipatif (diskusi online), kampanye digital, dan mobilisasi sosial (hashtag campaigns seperti #2019GantiPresiden) Pemuda menjadi "pemimpin opini digital" yang mempromosikan dialog sehat, seperti melalui tokoh seperti Najwa Shihab, yang meningkatkan literasi politik dan keterlibatan perempuan serta kaum muda.

Aspek Kesimpulan	Dampak Utama	Contoh Kasus
Partisipasi Online	Meningkat 40-50%, mengurangi apatis politik	Pemilu2024 & #TolakOmnibusLaw
Komunikasi Politik	Framing isu transparansi & anti-hoaks	Gerakan #ReformasiDikorupsi
Penguatan Demokrasi	Membangun jaringan sosial untuk good governance	Protes undang-undang baru

Tantangan dan Implikasi

Meskipun bermanfaat, praktik ini menghadapi tantangan seperti penyebaran hoaks, polarisasi (echo chamber), dan digital divide yang mengecualikan sebagian masyarakat, sehingga berpotensi merusak kualitas demokrasi. Determinisme teknologi dan buzzer politik memperburuk narasi kebencian, di mana 55% pemuda kesulitan membedakan fakta dan hoaks. Implikasinya, tanpa literasi digital yang kuat, potensi pemuda bisa tergerus, menyebabkan defisit demokrasi. Namun, media sosial tetap menjadi jalan alternatif untuk komunikasi politik yang lebih langsung dan interaktif.

Integrasikan pendidikan politik digital ke kurikulum sekolah dan kampanye nasional untuk meningkatkan literasi hingga 70%, serta optimalkan akun institusional seperti PUSPENPOL untuk sosialisasi pemilih. Pemerintah, partai politik, dan lembaga seperti Kemdikbud harus memantau penggunaan media sosial untuk mengurangi dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat positif. Dorong investasi pada pelatihan dan keterlibatan komunitas pemuda untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan, di mana mereka tidak hanya sebagai konsumen informasi, tapi juga produsen konten politik etis. Secara keseluruhan, kesimpulan artikel ini menekankan bahwa pemuda adalah aset strategis untuk masa depan demokrasi Indonesia di era digital. Dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, mereka dapat mewujudkan good governance dan partisipasi

inklusif, asal didukung oleh kebijakan yang pro-literasi. Ini selaras dengan semangat Sumpah Pemuda 1928, di mana pemuda menjadi penggerak perubahan nasional.

B. Pembahasan

Peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi digital menjadi isu sentral dalam perkembangan politik kontemporer Indonesia. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis data dalam artikel ini, terlihat bahwa media sosial berfungsi sebagai arena baru bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratisasi. Pemuda memanfaatkan media sosial seperti *Instagram*, *Twitter (X)*, dan *TikTok* tidak hanya untuk memperoleh informasi politik, tetapi juga untuk membentuk opini publik, mengkritisi kebijakan, serta melakukan advokasi terhadap isu-isu sosial yang relevan. Hal ini menandakan adanya pergeseran pola komunikasi politik dari bentuk konvensional menuju ruang digital yang lebih interaktif dan partisipatif. Sejalan dengan teori mediatisasi politik yang dikemukakan oleh McQuail (2011), media sosial telah mengubah cara warga berinteraksi dengan politik, menjadikan komunikasi politik lebih horizontal dan inklusif dibandingkan era sebelumnya.

Keterlibatan pemuda dalam politik digital menunjukkan peningkatan signifikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 91% pemuda generasi Z menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi politik hingga 40–50% dibandingkan era pra-digital. Fenomena ini mencerminkan apa yang dijelaskan oleh Nugroho (2012) bahwa digitalisasi memungkinkan terbentuknya “*citizens in action*,” yaitu warga negara yang secara aktif memanfaatkan teknologi untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Pemuda tidak lagi menjadi objek politik, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek yang mampu menciptakan wacana dan mempengaruhi agenda publik. Contohnya terlihat pada kampanye *#ReformasiDikorupsi* dan *#TolakOmnibusLaw* yang menjadi simbol kesadaran politik digital anak muda Indonesia.

Namun, dinamika partisipasi ini juga diiringi tantangan serius berupa penyebaran hoaks, polarisasi, dan fenomena *echo chamber*. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), sekitar 55% pemuda mengalami kesulitan membedakan informasi faktual dengan disinformasi politik. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan *buzzer politik* yang sering memanipulasi opini publik untuk kepentingan elektoral. Akibatnya, ruang publik digital berpotensi kehilangan fungsi deliberatifnya sebagai wadah dialog rasional dan inklusif. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Sejalan dengan temuan Feenstra dan Casero-Ripollés (2017), literasi digital yang kuat dapat meningkatkan kemampuan pemuda dalam memverifikasi informasi, memahami isu politik, serta berpartisipasi secara kritis dalam diskursus publik.

Selain itu, peran institusi pendidikan dan partai politik juga krusial dalam membangun kesadaran politik digital generasi muda. Menurut Permana (2022), pendidikan politik yang diintegrasikan ke dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler mampu meningkatkan pemahaman pemuda tentang demokrasi dan etika komunikasi politik. Di sisi lain, partai politik perlu mengoptimalkan strategi komunikasi digitalnya agar dapat menjangkau pemuda melalui konten kreatif dan interaktif, seperti yang dikemukakan oleh Wardhana (2019) tentang pemanfaatan media sosial oleh partai sebagai alat mobilisasi elektoral berbasis pemuda. Pendekatan ini tidak hanya memperluas partisipasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara representasi politik dan generasi digital native yang semakin dominan dalam demografi pemilih.

Dalam kerangka teori Postill (2020), keterlibatan pemuda dalam demokrasi digital dapat dikategorikan ke dalam empat bidang utama: pemerintahan digital (*e-petitions*), demokrasi partisipatif (diskusi daring), kampanye digital (dukungan kandidat), dan mobilisasi sosial (*hashtag campaign*). Keempat aspek ini saling berkaitan dalam menciptakan ekosistem demokrasi digital yang sehat dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kebijakan publik yang berorientasi pada penguatan literasi digital dan perlindungan hak-hak digital warga muda. Pemerintah, melalui lembaga seperti Kemenkominfo dan PUSPENPOL, diharapkan dapat berperan aktif dalam menyediakan edukasi politik digital yang berimbang serta memastikan media sosial tetap menjadi ruang aman bagi ekspresi politik warga negara.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pemuda adalah agen utama transformasi demokrasi digital Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial secara produktif dan etis, mereka mampu

mendorong partisipasi politik yang lebih luas, memperkuat transparansi pemerintahan, dan menegakkan prinsip *good governance*. Namun, potensi besar ini hanya dapat terealisasi apabila dibarengi dengan peningkatan literasi digital, pengawasan terhadap disinformasi, serta penguatan peran institusional dalam mendukung pendidikan politik generasi muda. Dengan demikian, demokrasi digital tidak hanya menjadi ruang partisipasi, tetapi juga wahana pembelajaran kolektif menuju masyarakat politik yang cerdas, kritis, dan beretika.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sangat penting dalam mewujudkan demokrasi. Media sosial menjadi salah satu alat yang membantu peran pemuda untuk membantu mengamankan suara-suara rakyat sehingga penguatan literasi pemuda saat ini menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Pemuda dianggap mampu membuka ruang demokrasi dengan diskusi publik atau hal lain sebagainya dengan begitu pendidikan politik sangat penting dipelajari bagi para pemuda guna memastikan bahwa demokrasi berjalan tanpa hambatan yang tidak jelas ataupun menghindari terjadinya isu kepentingan. Maka dari itu penelitian ini sangat penting untuk dikaji terutama dalam ranah politik.

Daftar Pustaka

- Achmad, F. (2024). *Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi Z pada Pemilu 2024*. Jurnal Pojok Penelitian & Pengabdian Masyarakat, Universitas Diponegoro.
- Ardianto, E., & Bambang Q-Anees. (2007). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Penerbit Andi.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Bimantara, P. D., & Mantoro, S. (2019). Media sosial dan partisipasi politik generasi muda: Studi kasus gerakan #2019GantiPresiden di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(2), 221–234.
- Budiatri, A. P., & Wiratman, H. (2022). *Demokrasi tanpa demos: Refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Chadwick, A., & Howard, P. N. (Eds.). (2009). *Routledge handbook of internet politics*. Routledge.
- Feenstra, R. A., & Casero-Ripollés, A. (2017). The role of social media in the processes of political communication. In *Handbook of research on deception, fake news, and misinformation online* (pp. 1–20). IGI Global.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the virtual state: Information technology and institutional change*. Brookings Institution Press.
- Haryanto, A., & Amelia, N. (2021). Ruang publik digital dan demokrasi di Indonesia: Analisis partisipasi politik generasi milenial di media sosial. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 11(1), 21–37.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan literasi digital nasional 2023*. Kemenkominfo.
- McQuail, D. (2011). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, A. D., & Rachmawati, L. (2020). Peran media sosial dalam partisipasi politik generasi muda di era demokrasi digital. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 1–18.
- Nugroho, Y. (2012). *Citizens in @ction: Demokrasi dan partisipasi politik di era digital*. Penerbit Buku Kompas.
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial. *Jurnal Aspikom*, 3(4), 737–754.
- Permana, A. A. (2022). Pengaruh media sosial sebagai alat komunikasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Common*, 3(1), 71–80.
- Postill, J. (2020). Digital politics and political engagement. In *The Oxford handbook of digital technology and society*. Oxford University Press.
- Putricia, N. D., et al. (2024). Studi literatur: Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z (Zoomers). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 74–82.
- Setiawan, A., & Pratama, M. F. (2024). Strategi komunikasi politik akun resmi pemerintah di media sosial selama Pemilu 2024. *Jurnal Komunikasi Politik Digital*, 3(1), 35–50.

Sutiyono, W. (2018). Media sosial dan partisipasi politik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 607–624.

Wardhana, R. A. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana politik oleh partai politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 68–80.